

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN
SUKARELA LAPORAN TAHUNAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ULA RESTU RAFIFAH

NIM. 12030111130052

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ula Restu Rafifah
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130052
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN
TAHUNAN**
Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Ratmono, SE., Msi., Akt.

Semarang, 17 Juni 2015

Dosen Pembimbing

Dr. Dwi Ratmono, SE., M.Si., Akt.

NIP. 19801001 200801 1014

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ula Restu Rafifah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130052

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul : **PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
PENGUNGKAPAN SUKARELA LAPORAN
TAHUNAN**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Juni 2015

Tim Penguji:

1. Dr. Dwi Ratmono, SE., M.Si., Akt. (.....)
2. Agung Juliarto, SE., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
3. Dr. H. Haryanto, S.E., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ula Restu Rafifah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Sukarela Laporan Tahunan** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 Juni 2015

Yang membuat pernyataan,

Ula Restu Rafifah

NIM. 12030111130052

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of corporate governance mechanisms like independent board of commissioners, board of commissioners who have the capability of accounting or business, board commissioners meetings, size board of commissioners, independent audit committee, audit committee who has the capability of accounting or business, audit committee meetings, quality auditor, and institutional ownership on voluntary disclosure. Profitability and firm size used as control variable.

The population in this study are manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010, 2011, 2012, and 2013. The sampling method in this research is purposive sampling. Sampled companies there are 43 companies with a total number of samples in this study were 172 data. Then, there are 12 samples that include outlier should be excluded from samples of observation. So, the final amounts of the sample are 160 data. Multiple regression used to be analysis technique.

The results showed that, only board of commissioners meetings that have a significant influence on voluntary disclosure with the positive direction, which is consistent with the hypothesis, while other variables results show inconsistent with the hypothesis. Independent board of commissioners, independent audit committee, and audit committee who has the capability of accounting or business have significant influence on voluntary disclosure, but with a negative direction. Board of commissioners who have the capability of accounting or business, size of the board of commissioners, audit committee meetings, quality auditors, and institutional ownership has no influence on voluntary disclosure.

Keyword : *Voluntary Disclosure, Corporate Governance Mechanisms, Agency Theory, Resource Dependency Theory.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* seperti proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, rapat komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Perusahaan yang dijadikan sampel ada 43 perusahaan dengan jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 172 data. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 12 data *outlier* yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir yang layak diobservasi yaitu 160 data. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya jumlah rapat dewan komisaris yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela dengan arah positif yang sesuai dengan hipotesis, sedangkan variabel lainnya menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis. Variabel proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi komite audit yang independen, dan proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela, tetapi dengan arah negatif. Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, ukuran dewan komisaris, rapat komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Kata kunci : Pengungkapan Sukarela, Mekanisme *Corporate Governance*, Teori Agensi, Teori Ketergantungan Sumber Daya.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh bekerja (urusan), dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau berharap.

(Q.S. al –Insyirah 5-8)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua dan Adik-adikku tercinta

Sahabat dan teman – teman ku sayang

Keluarga besar Akuntansi 2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmatNya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya campur tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan yang begitu besar dari :

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Dwi Ratmono, SE., Msi., Akt selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Bapak Dr. H. Raharja, M.Si., Akt selaku dosen wali.
4. Semua dosen dan staff tata usaha yang telah membantu kelancaran penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Orang tua tercinta, Bapak Miswanto dan Ibu Nevi Suci Anugrawati serta Adik-Adikku Raza dan Raya, terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
6. Keluarga besar Haji Muslim dan keluarga besar Tajir Muluk Jahri terima kasih atas doa yang dipanjatkan, serta dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
7. Sahabat-Sahabatku, Ika, Puspa, Putri, Nanin, Chita, Nanda, Ersha, Melia, Intan, Nurul, Alfi, Shofwa, dan seluruh keluarga besar Akuntansi Undip 2011. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.

8. Terima kasih untuk seluruh penghuni kosan Omah Ijo. Terima kasih untuk mbak Dini, Pipin, Shelvi, mbak Narti, Putri, Dwi, dan Yani. Terima kasih untuk kasih sayang, dukungan, waktu, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih untuk seluruh anggota UKM *Research and Business* (RnB). Terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan selama berproses di organisasi.
10. Seluruh kerabat, teman, pihak-pihak yang sudah membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan doanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai input bagi penulis agar dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 16 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Literatur.....	13
2.1.1. <i>Voluntary Disclosure</i> (Pengungkapan Sukarela)	13
2.1.2. <i>Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan).....	14
2.2. Landasan Teori.....	26
2.2.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	26
2.2.2. Teori Ketergantungan terhadap Sumber Daya (<i>Resource Dependency Theory</i>)	27
2.3. Penelitian Terdahulu	28
2.4. Kerangka Pemikiran.....	32

2.5. Pengembangan Hipotesis	39
2.5.1. Proporsi Dewan Komisaris yang Independen	39
2.5.2. Proporsi Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis.....	40
2.5.3. Jumlah Rapat Dewan Komisaris	41
2.5.4. Ukuran Dewan Komisaris	42
2.5.5. Proporsi Komite Audit yang Independen.....	44
2.5.6. Proporsi Anggota Komite Audit yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis.....	45
2.5.7. Jumlah Rapat Komite Audit.....	47
2.5.8. Kualitas Auditor	47
2.5.9. Kepemilikan Institusional	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel	50
3.1.1. Variabel Dependen.....	50
3.1.2. Variabel Independen	52
3.1.3. Variabel Kontrol.....	58
3.2. Populasi Dan Sampel	59
3.3. Jenis Dan Sumber Data	59
3.4. Metode Pengumpulan Data	60
3.5. Metode Analisis	60
3.5.1. Statistik Deskriptif	60
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	61
3.5.3. Analisis Regresi Berganda	65
3.5.4. Uji Hipotesis.....	67
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	70
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	70
4.2. Hasil Uji Analisis Data Penelitian.....	72
4.2.1. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	73
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	79

4.2.3.	Uji Hipotesis.....	84
4.2.4.	Analisis Regresi Berganda	95
4.3.	Interpretasi Hasil	96
4.3.1.	Proporsi Dewan Komisaris yang Independen (DKI)	96
4.3.2.	Proporsi Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis (KEMPDK)	98
4.3.3.	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (RPTDK)	99
4.3.4.	Ukuran Dewan Komisaris (UD).....	100
4.3.5.	Proporsi Komite Audit yang Independen (KAUDI)	101
4.3.6.	Proporsi Komite Audit yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis (KEMPAUD)	102
4.3.7.	Jumlah Rapat Komite Audit (RPTAUD)	103
4.3.8.	Kualitas Auditor (KA).....	103
4.3.9.	Kepemilikan Institusional (KI)	104
BAB V PENUTUP.....		106
5.1.	Kesimpulan.....	106
5.2.	Implikasi	107
5.3.	Keterbatasan.....	107
5.4.	Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA		109
LAMPIRAN.....		114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	28
Tabel 2.2.....	49
Tabel 3.1.....	65
Tabel 4.1.....	71
Tabel 4.2.....	72
Tabel 4.3.....	73
Tabel 4.4.....	74
Tabel 4.5.....	80
Tabel 4.6.....	81
Tabel 4.7.....	82
Tabel 4.8.....	83
Tabel 4.9.....	85
Tabel 4.10.....	86
Tabel 4.11.....	88
Tabel 4.12.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	38
------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN	114
LAMPIRAN B STATISTIK DESKRIPTIF	115
LAMPIRAN C UJI NORMALITAS	116
LAMPIRAN D UJI MULTIKOLINEARITAS	117
LAMPIRAN E UJI HETEROSKEDATISITAS.....	118
LAMPIRAN F UJI AUTOKORELASI	118
LAMPIRAN G UJI REGRESI.....	119
LAMPIRAN H <i>VOLUNTARY DISCLOSURE INDEX</i>	121
LAMPIRAN I DATA PENELITIAN	123

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan dalam perkembangannya dalam dunia bisnis tidak selalu mengalami keuntungan terus menerus tetapi sejumlah perusahaan masih mengalami kegagalan bahkan kebangkrutan bisnis seperti Enron, World com dan Paramalat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dan kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan adalah kurangnya informasi perusahaan yang diungkapkan berkaitan dengan kegiatan perusahaan serta lemahnya dalam sistem manajemen perusahaan. Ancaman–ancaman kegagalan dan kebangkrutan bisnis tersebut menekan komite tata kelola perusahaan dan organisasi-organisasi di seluruh dunia untuk menyediakan informasi dalam sejumlah laporan dan menetapkan aturan-aturan yang dapat membantu dalam pemantauan dan pengawasan sistem manajemen perusahaan (Yaseen Al Janadi, *et al.*, 2013). Oleh karena itu salah satu cara untuk mengatasi ancaman kegagalan dan kebangkrutan adalah menyediakan informasi tambahan yang memadai.

Pengungkapan informasi yang memadai merupakan hal yang penting karena tanpa informasi tersebut, investor tidak dapat menilai resiko dan peluang secara tepat. Adanya unsur-unsur ketidakpastian tentang kualitas perusahaan dalam hal aset atau resiko arus kas dan surat-surat berharga membuat investor meminta informasi tambahan untuk

membantu dalam membuat keputusan-keputusan investasi. Pengungkapan informasi tambahan tersebut akan membantu investor mengurangi kemungkinan kesalahan dalam membuat keputusan investasi. Selain itu, terjadinya perubahan lingkungan dan peningkatan kompleksitas bisnis akan menimbulkan tuntutan tambahan untuk informasi (FASB,2001). Perilaku penyediaan informasi tambahan yang lebih ke publik memiliki apresiasi positif oleh pemegang saham karena dengan hal ini dapat memberikan nilai positif dibandingkan perusahaan yang tidak menyediakan informasi tambahan. Perusahaan memenuhi permintaan ini dengan menyediakan informasi tambahan dalam laporan tahunan.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007:1) laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setahun sekali yang berisi data keuangan (laporan keuangan) dan data informasi non-keuangan. Sedangkan laporan keuangan berisi informasi keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Khan *et al.* (2013) menyatakan bahwa pengungkapan informasi yang dimuat dalam *annual report* terpublikasi yakni laporan tahunan dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Menurut Darrough (1993) pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang bebas dilakukan manajemen perusahaan untuk

memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan tahunan. Pengungkapan wajib ataupun pengungkapan sukarela merupakan cara yang terbaik untuk mempublikasikan informasi terkait dengan kondisi perusahaan pada waktu tertentu kepada para pemegang saham. Tujuan dari pengungkapan sukarela adalah untuk memberikan kebutuhan informasi yang lebih kepada para pengguna investor dalam pengambilan keputusan. Selain itu pengungkapan sukarela dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dengan menjadi sebagai alat pembeda dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Dalam mewujudkan pengungkapan sukarela yang memadai untuk kepentingan pemegang saham dan perusahaan, peran manajemen sangat penting karena pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan diungkapkan oleh akuntan perusahaan dengan persetujuan manajemen puncak perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki sistem *Corporate Governance* yang baik, maka kualitas pengungkapan sukarela perusahaan menjadi lebih baik.

Corporate Governace perusahaan adalah faktor yang membawa kualitas yang lebih baik untuk kinerja perusahaan dan, khususnya, informasi yang disampaikan oleh manajemen (Nurbuana 2011). Sistem *Good Corporate Governance* (GCG) telah terkandung dalam misi perusahaan yaitu untuk menciptakan daya saing dalam menarik perhatian investor dan pengguna laporan keuangan melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya, dan

penerapan tata kelola perusahaan (BEI, 2011). Krisis perbankan di Indonesia yang terjadi pada akhir tahun 1997 adalah akibat dari krisis ekonomi dan kurangnya penerapan tata kelola perusahaan dan etika yang mendasarinya. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan kajian *Pricewaterhouse Coopers* yang dimuat di dalam *Report on Institutional investor survey* (2002) yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi paling bawah bersama China dan India dalam hal transparansi dan keterbukaan.

Keuntungan perusahaan menerapkan GCG adalah akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modal di perusahaan serta akan memberi dampak pada pengungkapan informasi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan guna untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme *Corporate Governance* adalah merupakan suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2005). Berdasarkan pengertian tersebut peran mekanisme dalam pengungkapan sukarela

sangatlah penting. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan Indonesia berlomba dalam hal penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan melalui pengungkapan dalam laporan keuangan khususnya Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*).

Isu-isu pengungkapan dan tata kelola perusahaan telah mendominasi berita utama dari para pers dunia bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian telah diterbitkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Eropa continental dan Negara-negara Asia Barat (misalnya Arcay & Vazquez, 2005; Chen & Janggi, 2000; Ho & Wong, 2001). Sebagian besar dari studi empiris di berbagai negara di seluruh dunia ini yang meneliti hubungan antara mekanisme *Corporate Governance* (misalnya struktur dewan) dan pengungkapan sukarela memberikan hasil yang beragam (misalnya Arcay & Varquez, 2005 dan Ho & Wong, 2001).

Penelitian ini menggunakan penelitian Yaseen Al-Janadi, *et al* (2013) dalam jurnal yang berjudul “*Corporate Governance Mechanisms and Voluntary Disclosure in Saudi Arabia*” sebagai jurnal acuan utama. Penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh seperangkat mekanisme *Corporate Governance* yang meliputi proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit

yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela di perusahaan Indonesia yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel *CEO duality* dan mengganti variabel proporsi direktur non eksekutif dengan nama dewan komisaris yang independen yang digunakan dalam penelitian Yaseen Al-Janadi, *et al* (2013) karena struktur pemerintahan yang di gunakan di Indonesia berbeda dengan di Saudi Arabia. Struktur pemerintahan di Indonesia menggunakan model *two-tier board system*, yang memisahkan antara anggota direksi sebagai pelaksana operasional perusahaan dengan anggota dewan komisaris sebagai pengawas. Sehingga *CEO duality* tidak dapat ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Selain variabel dewan komisaris yang independen dalam penelitian ini ditambahkan variabel dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dan jumlah rapat dewan komisaris. Hal ini telah diatur dalam pedoman GCG Indonesia 2006 tentang kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris yang menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris harus memiliki syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Variabel jumlah rapat dewan komisaris ditambahkan untuk menjelaskan pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela karena jumlah rapat yang tinggi dapat

meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajer dalam pengungkapan sukarela.

Variabel proporsi komite audit dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan keberadaan komite audit yang independen sebagai variabel independen, tetapi ditambahkan variabel independen proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis. Hal ini dikarenakan sesuai dengan persyaratan keanggotaan komite audit yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tahun 2012 tentang dalam anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan kemampuan di bidang akuntansi atau bisnis. Variabel jumlah rapat komite audit ditambahkan karena dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 yang dikeluarkan BAPEPAM & LK menyatakan bahwa rapat komite audit paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Selain itu dalam penelitian sebelumnya tidak diteliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela maka dalam penelitian ini menambahkan kepemilikan institusional sebagai salah satu variabel independen menggantikan kepemilikan pemerintah. Sangat sedikit perusahaan-perusahaan publik yang memiliki kepemilikan saham pemerintah, sehingga dalam penelitian ini tidak digunakan kepemilikan pemerintah sebagai variabel independen. Seperti halnya kepemilikan pemerintah,

proporsi anggota keluarga dalam dewan juga tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, karena tidak banyak perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai hubungan keluarga antara sesama anggota direksi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Wijayanti (2013). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan tiga tahun periode tahunan yaitu tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Penelitian yang dilakukan sebelumnya dilakukan pada tahun 2009, 2010, dan 2011.
2. Dalam penelitian ini menambahkan variabel proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, dan kepemilikan institusional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah proporsi dewan komisaris yang independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah proporsi komite audit yang independen berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
7. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
8. Apakah kualitas auditor berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

9. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris yang independen dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah rapat dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit yang independen dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
6. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
7. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah rapat komite audit dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).
8. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kualitas auditor dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

9. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan meningkatkan perkembangan terhadap teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) agar transparansi laporan keuangan tercapai dan dapat digunakan investor sebagai tambahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam investasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini menguraikan landasan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP, bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

2.1.1. *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela)

Salah satu tujuan dari kegiatan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan. Demi tercapainya tujuan pelaporan keuangan maka perusahaan perlu memberikan pengungkapan informasi yang jelas dan lengkap, baik yang bersifat keuangan atau non keuangan demi kebutuhan para investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kata pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Dan bila dikaitkan dengan laporan keuangan maka pengungkapan (*disclosure*) adalah laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2007). Oleh karena itu informasi yang disediakan harus lengkap, jelas, dan tepat dalam menjelaskan seluruh kejadian operasional yang terjadi dalam perusahaan.

Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan di bedakan menjadi dua jenis yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia kegiatan pasar modal dan

lembaga keuangan diatur Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang saat ini telah berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengatur pengungkapan laporan keuangan, Bapepam-LK mengeluarkan peraturan Nomor KEP-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang bersifat sukarela dan tidak diatur dalam peraturan Bapepam-LK Nomor KEP-431/BL/2012. Dalam pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) perusahaan diberi kebebasan dalam mengungkapkan maka dari itu akan menimbulkan banyak variasi informasi yang disediakan oleh setiap perusahaan. Pengungkapan sukarela ini dilakukan perusahaan jika informasi perusahaan yang disediakan menguntungkan pihak perusahaan.

2.1.2. *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Adanya pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendukung pelaksanaan *Corporate Governance* di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1999, KNKG mengeluarkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang pertama. *Corporate Governance* didukung dengan diterbitkannya pedoman umum ini, karena diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin melaksanakan GCG. Perkembangan terbaru dari *Corporate Governance* di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia pada tahun

2012. Tujuan utama Roadmap adalah sebagai suatu tonggak sejarah dalam upaya untuk meningkatkan implementasi praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Roadmap berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai tata kelola perusahaan yang terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu pendahuluan, penguatan tata kelola perusahaan yang baik dan rencana implementasi.

2.1.2.1. Pengertian Good Corporate Governance

Keberadaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efisien dan efektif dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu kunci perusahaan sukses jangka panjang dalam menghadapi persaingan dunia global terutama bagi perusahaan yang *go public*. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, FCGI (2002) definisi *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengemukakan bahwa pengertian *corporate governance* adalah struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Dengan demikian pengertian *Good Corporate Governance* adalah suatu peraturan/proses

yang menjadi tujuan dan sistem yang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kinerja perusahaan. Keuntungan perusahaan menerapkan GCG adalah akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan modal di perusahaan serta akan memberi dampak pada pengungkapan informasi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan guna untuk mengurangi asimetri informasi.

2.1.2.2.Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Empat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) yaitu:

1. *Fairness* (Kewajaran)

Memberikan perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham dan jaminan perlindungan hak pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*Insider trading*).

2. *Disclosure* dan *Transparency* (Transparansi)

Hak-hak para pemegang saham yaitu harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktu mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi

kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*Stakeholders*).

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris serta pertanggungjawaban manajemen kepada manajemen dan para pemegang saham. Pertanggungjawaban manajemen diwujudkan dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.

4. *Responsibility* (Tanggung jawab)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Lima prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dijabarkan oleh Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD sebagai berikut:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Kemandirian

Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi sehat.

3. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.

5. Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.3. Mekanisme Corporate Governance

Suatu mekanisme aktivitas perusahaan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance*. Mekanisme dibutuhkan oleh perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan teratur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Syakhroza (2002) mekanisme *Corporate*

Governance adalah suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Sementara menurut Daniri (2005) pengertian mekanisme *Good Corporate Governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan GCG merupakan suatu prosedur atau proses yang digunakan oleh organ perusahaan yang dapat mengendalikan perusahaan, sehingga memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan *stakeholders* secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini yang menggambarkan mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) adalah proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi anggota komite audit yang independen, proporsi anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, rapat anggota komite audit, kualitas auditor, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas

- a. Proporsi dewan komisaris yang independen

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (2006) dewan komisaris terdiri dari pihak manajemen yang terafiliasi dan pihak yang tidak terafiliasi atau biasa disebut dengan dewan komisaris independen. Dewan komisaris yang terafiliasi adalah anggota dewan komisaris yang memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan direksi dan pemegang saham. Dewan komisaris yang independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan (Undang-Undang Perseroan Terbatas ayat 12(2) no 40 tahun 2007).

- b. Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis

Dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis adalah anggota dewan komisaris yang memiliki pengalaman pendidikan dalam bidang akuntansi atau bisnis serta pengalaman bekerja dalam bidang akuntansi atau bisnis. Sesuai dengan Pedoman *Good Corporate Governance* Indonesia 2006 tentang kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris yang menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris harus memiliki syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Rapat dewan komisaris

FCGI (2002) menjelaskan bahwa rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara manajemen. Dalam rapat tersebut akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan.

d. Ukuran dewan komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah seluruh anggota dewan komisaris yang berada dalam perusahaan yang menjalankan fungsi operasional perusahaan serta berusaha mewujudkan cita-cita perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Besarnya atau kecilnya ukuran dewan komisaris adalah salah satu faktor dari kesuksesan perusahaan. Besarnya ukuran dewan komisaris akan menambah pengetahuan masing-masing dewan yang akan membantu dalam menjalankan perusahaan, tetapi semakin besarnya ukuran dewan komisaris dapat menimbulkan kontradiksi pemikiran dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan penundaan pengambilan keputusan. Sedangkan kecilnya ukuran dewan komisaris dipandang lebih efisien dan efektif dalam pemantauan dan pengawasan kinerja perusahaan serta pengambilan keputusan karena tidak menimbulkan kontradiksi pemikiran yang akan menghambat operasional perusahaan.

e. Proporsi anggota komite audit yang independen

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Peraturan Bapepam-LK KEP-643/BL/2012). Dalam peraturan Bapepam-LK KEP-643/BL/2012 beberapa syarat-syarat keanggotaan komite audit yaitu:

- a) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen.
- b) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
- c) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
- d) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Peran penting yang dimiliki komite audit memastikan kualitas pelaporan keuangan, meninjau, dan menilai sistem pengendalian internal dan memantau hubungan antara manajemen dan auditor eksternal (NACD, 2000). Peran ini akan sangat membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Karakteristik

yang paling penting dari komite audit adalah adanya mayoritas komite audit yang independen agar menjaga hasil kualitas auditor karena komite audit bekerja secara obyektif dan tidak memihak siapapun baik manajer, pemegang saham ataupun pihak-pihak yang berkuasa. Pengertian anggota komite audit yang independen adalah anggota komite audit yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

- f. Proporsi anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis. Salah satu syarat keanggotaan dalam peraturan Bapepam-LK KEP-643/BL/2012 sebagai berikut:
 - a) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b) Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangandi bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya; bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikandan pelatihan.
 - c) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan kemampuan di bidang akuntansi atau bisnis.

Sesuai dengan persyaratan tersebut maka komite audit dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi atau bisnis agar

menjaga hasil kualitas auditor karena komite audit bekerja secara obyektif dengan kemampuan yang profesional dan memadai.

g. Rapat anggota komite audit

Rapat anggota komite audit merupakan suatu pertemuan koordinasi antara anggota-anggota agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan (Wulan, 2013). Peraturan Bapepam-LK (2012) dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa rapat komite audit paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

h. Kualitas auditor

Menurut DeAngelo (1981) kualitas auditor didefinisikan sebagai probabilitas gabungan mendeteksi dan melaporkan material kesalahan laporan keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut kualitas auditor perusahaan yang baik apabila suatu perusahaan telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang memasuki empat besar terbesar di suatu negara karena akan menghasilkan informasi yang baik. Kantor Akuntan publik yang besar cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak dalam rangka mengurangi kewajiban hukum mereka. Di Indonesia kantor akuntan publik yang menduduki empat besar adalah Delloite, PWC, Erns & Young, dan KPMG.

i. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu atau lebih institusi (lembaga). Institusi atau lembaga di sini dapat berupa bank, perusahaan investasi, ataupun perusahaan lainnya. Adanya kepemilikan oleh institusi (lembaga) akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap kinerja perusahaan. Institusi keuangan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer agar tidak menyimpang dan bekerja sesuai kepentingan para pemegang saham.

j. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecilnya perusahaan dan struktur kepemilikan yang dimilikinya. Perusahaan yang besar cenderung akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan yang lebih kecil. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (*size*) sebuah perusahaan, adalah dengan ukuran total aset. Aset perusahaan terdiri atas aset lancar dan aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset yang besar menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam kegiatan operasional.

k. Profitabilitas

Standar Akuntansi Keuangan (2009) mengungkapkan bahwa indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masadepan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan

pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Salah satu cara menghitung profitabilitas adalah dengan menghitung *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* adalah rasio yang menunjukkan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE merupakan rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan laba yang tersedia bagi pemegang saham.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) masalah keagenan muncul dari konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dimana manajer memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingannya dengan mengorbankan kesejahteraan pemegang saham. Kepentingan ini menyebabkan pemegang saham untuk lebih bersemangat dalam memantau manajer dengan mendelegasikan wewenang kepada direktur untuk memantau dan mengawasi setiap keputusan yang dibuat oleh manajer. Salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan adalah dengan cara melakukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Agar terwujudnya praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) perusahaan harus melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yaitu :

- 1) Transparansi (*transparency*)

- 2) Akuntabilitas (*accountability*)
- 3) Keadilan (*fairness*)
- 4) Responsibilitas (*responsibility*)
- 5) Kemandirian (*Independency*)

Praktik tata kelola perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer perusahaan.

2.2.2. Teori Ketergantungan terhadap Sumber Daya (*Resource Dependency Theory*)

Teori ketergantungan terhadap sumber daya adalah suatu studi tentang bagaimana sumber daya eksternal organisasi mempengaruhi perilaku organisasi. Menurut Pfeffer (1972) teori ketergantungan terhadap sumber daya berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris yang besar memiliki berbagai pengetahuan dan kemampuan yang lebih dalam mengelola sumber daya yang tersedia di dalam perusahaan. Tetapi Pfeffer dan Salancik (1978) menyebutkan bahwa teori ketergantungan sumber daya terhadap hubungan inter-organisasional adalah suatu fenomena dimana inter-organisasi akan mengatur secara keseluruhan di berbagai tingkatan hasil performansi organisasi. Menurut Pfeffer dan Salancik (1978) faktor internal organisasi hanya menyumbang 10 persen terhadap performansi organisasi.

Emerson (1962) mengidentifikasikan pembahasan teori ini dalam hubungan kausalitas antara konsep kekuasaan dengan konsep

ketergantungan yang diasumsikan terdiri atas A dan B. Pengaruh A terhadap B didasarkan pada ketergantungan terhadap sumber daya. Contohnya adalah hubungan antara manajer restoran dengan restoran. Manajer restoran dapat menjamin bahwa konsumen akan mendapatkan fasilitas yang terbaik dari restoran dan sebaliknya restoran dapat menjamin bahwa fasilitas tersebut bisa digunakan. Dalam teori ketergantungan sumber daya lebih menekankan pada kekuatan politik yang dimiliki oleh organisasi daripada kinerja organisasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Pfeffer dan Salancik (1978) memberikan solusi terhadap masalah saling ketergantungan adalah dengan meningkatkan pengawasan yang menguntungkan bagi setiap pihak yang bersangkutan.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	<i>Corporate governance mechanisms and voluntary disclosure in Saudi Arabia</i>	Yaseen Al-Janadi, et al (2013)	Dependen: <i>Voluntary Disclosure</i> Independen: Dewan Komisaris Independen, ukuran dewan, kualitas auditor, kepemilikan pemerintah, <i>CEO duality</i> , Proporsi anggota keluarga dalam dewan, dan komite audit	Dewan komisaris independen, ukurandewan, kualitas auditor danukuran perusahaanmempunyai hubungan yangsignifikan positif terhadap <i>voluntary disclosure</i> . <i>CEO duality</i> , kepemilikanpemerintah berpengaruhsignifikan negatif terhadap <i>voluntary disclosure</i> . Proporsi dewan yanghubungan

			yang independen	keluarga, anggotakomite audit independen,tidak berhubungan signifikanterhadap <i>voluntary disclosure</i>
2	<i>The Impact of the Board of Director's Composition, Audit Committee and Firm Size on the Level of Voluntary Disclosure: Empirical Evidence from Jakarta Stock Exchange</i>	Arifin, D.N. Ibrahim, and H. Haron (2001)	Dependen: Luas Pengungkapan Sukarela Independen: Komposisi Komisaris Independen, Komite Audit, dan Size	Komposisi Komisaris Independen dan <i>size</i> perusahaan berhubungan signifikan dengan luas pengungkapan sukarela Komite audit berhubungan dengan luas pengungkapan sukarela.
3	Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komposisi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela	Andini Ayu K. (2013)	Dependen: Tingkat Pengungkapan Sukarela Independen: Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan institusi) Komposisi Dewan Komisaris Independen	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada tingkat pengungkapan sukarela Kepemilikan institusi, pemerintah, dan komposisi dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela
4	<i>The Characteristics Of Commissioner Board, Industry Specialize Audit Firm, Earnings Management And Voluntary Disclosure</i>	Nuryaman (2010)	Dependen: Manajemen Laba Pengungkapan Sukarela Independen: Independensi Dewan, Ukuran Dewan, Kompetensi dewan Komisaris, dan Kualitas Auditor	Independensi Dewan tidak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan pengungkapan sukarela Ukuran dewan memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba dan tidak memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela Kompetensi dewan

				komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba dan pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba tetapi berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.
5	Dewan komisaris dan transparansi: Teori keagenan atau teori <i>stewardship</i>	Tarmizi Achmad (2012)	Dependen: Luas pengungkapan sukarela Independen: Ukuran dewan, Intensitas pertemuan dewan Komite audit, Proporsi dewan independen, dan Proporsi dewan insider	Ukuran dewan, intensitas pertemuan dewan, jumlah insider dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary disclosure</i> . Proporsi dewan independen tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela
6	Analisis Dewan Komisaris, Komite Audit dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pengungkapan Sukarela (<i>voluntary disclosure</i>)	Aditya Septiani (2011)	Dependen: Pengungkapan Sukarela (<i>voluntary disclosure</i>) Independen: Komposisi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Kompensasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi Independen, Aktifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit, Ukuran Perusahaan,	Proporsi dewan komisaris independen, komite audit, komite kompensasi dan nominasi dilakukan oleh direksi independen, profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah informasi yang diungkapkan. Jumlah dewan komisaris, jumlah pertemuan, dan ukuran perusahaan ada korelasi positif dengan jumlah pengungkapan sukarela laporan tahunan

			<i>Leverage, dan Profitabilitas</i>	
7	<i>A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure</i>	Simon S. M. Ho, & Kar Shun Wong. (2001)	Dependen: Pengungkapan Sukarela Independen: Proporsi dewan non eksekutif, Keberadaan komite audit, CEO duality, dan persentase anggota keluarga dalam dewan	Keberadaan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela Persentase anggota keluarga dalam dewan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela
8	<i>Board ownership, audit committees' effectiveness and corporate voluntary disclosures</i>	M. Akhtaruddin, Hasnah Haron, (2010)	Dependen: Pengungkapan Sukarela Independen: Kepemilikan Dewan, Efektivitas komite audit (proporsi direktur non eksekutif independen dan anggota ahli komite audit)	Temuan memberikan dukungan bagi perusahaan dengan tingkat yang lebih tinggi kepemilikan dewan direksi untuk menyertakan komite audit dan ahli komite audit untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan investor.
9	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan	Sari Wulan (2013)	Dependen: Pengungkapan Sukarela Independen: Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi domestic, Jumlah Rapat dewan komisaris, dan Jumlah rapat komite audit	Jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela dan pengungkapan IFRS. Kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi domestic, dan jumlah rapat dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan.
10	Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan,	Nuryaman (2009)	Dependen: Pengungkapan Sukarela	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) konsentrasi

	Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Sukarela		Independen: Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, susunan dewan komisaris, kualitas audit	kepemilikan berpengaruh positif terhadap signcantly pengungkapan sukarela; (2) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela; (3) Susunan dewan komisaris tidak berpengaruh pada pengungkapan sukarela; (4) kualitas audit, signifikan dan positif dipengaruhi pengungkapan sukarela.
--	--	--	--	--

2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dijelaskan dan digambarkan alur hubungan yang logis antara variabel penelitian dalam suatu kerangka pemikiran. Gambar kerangka pemikiran yang akan disajikan dapat membantu dalam memahami pengaruh antar variabel.

Salah satu wujud dari prinsip praktik tata kelola perusahaan (Corporate Governance) adalah pengungkapan. Kata pengungkapan (*disclosure*) memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Dan bila dikaitkan dengan laporan keuangan maka pengungkapan (*disclosure*) adalah laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, 2007). Peran pengungkapan sangat penting bagi para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan karena informasi

tambahan yang disajikan dapat mempengaruhi suatu keputusan investasi. Adanya pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendukung pelaksanaan *Corporate Governance* di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan dikeluarkannya pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) oleh KNKG pada tahun 1999 diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan yang ingin melaksanakan GCG.

Pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan di bedakan menjadi dua jenis yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pada dasarnya pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan dibuat oleh akuntan perusahaan. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) memiliki perbedaan dalam proses penyajian pengungkapan yaitu penyajian pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dilakukan oleh akuntan perusahaan berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor KEP-431/BL/2012. Sedangkan dalam pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) perusahaan diberi kebebasan dalam mengungkapkan maka dari itu akan menimbulkan banyak variasi informasi yang disediakan oleh setiap perusahaan. Dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) ini dilakukan perusahaan jika perusahaan merasa informasi yang disediakan menguntungkan pihak

perusahaan. Variasi informasi dalam pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang tersedia di setiap perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor adalah proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi anggota komite audit yang independen, proporsi anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat anggota komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional. Suatu pengungkapan sukarela yang dibuat oleh akuntan perusahaan tidak akan diungkapkan bila tidak disetujui oleh pihak manajemen puncak.

Proporsi dewan komisaris independen, proporsi dewan komisaris yang independen yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi anggota komite audit yang independen, proporsi anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat anggota komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela oleh perusahaan. Fungsi dewan komisaris adalah mengawasi kinerja manajer dalam kegiatan operasional perusahaan khususnya dalam hal pengungkapan. Agar kepentingan pemegang saham menjadi prioritas utama dalam perusahaan maka perusahaan harus meningkatkan tingkat pengawasan dan pengontrolan kinerja manajer puncak agar tidak memetingkan kepentingan direksi atau suatu oknum yang dapat merugikan

para pemegang saham. Oleh karena itu dibutuhkannya dewan komisaris yang bersifat independen yang tidak memihak dewan direksi. Sesuai dengan teori agensi dengan memiliki dewan komisaris yang independen akan memiliki kekuatan lebih besar dalam memonitor manajemen untuk mengungkapkan informasi. Selain sifat yang independen kemampuan akuntansi atau bisnis yang dimiliki dewan komisaris juga mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan karena dengan memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis diharapkan dewan komisaris memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sistem pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menyajikan pengungkapan yang dibutuhkan oleh para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan.

Suatu perusahaan terdiri sekurang-kurangnya tiga dewan komisaris yang setiap tahunnya selalu mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Semakin seringnya rapat diadakan maka akan seringnya pertemuan antara dewan komisaris yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajer sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan khususnya pengungkapan sukarela perusahaan. Adanya kepemilikan oleh institusi (lembaga) akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan teori agensi jika kepemilikan institusional yang memiliki proporsi saham yang lebih besar akan dapat mendesak para manajer dan

direktur untuk melakukan pengungkapan baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela. Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, dan kepemilikan institusional dapat mencerminkan tingkat independensi, kemampuan, dan kualitas dari pengawasan manajemen perusahaan.

Manajemen puncak (dewan) suatu perusahaan terdiri dari dewan komisaris dan direktur. Setiap perusahaan memiliki ukuran dewan komisaris yang berbeda-beda tergantung kepada kebutuhan perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang kecil dan ada pula perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang besar. Kecilnya ukuran dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas pemantauan maka akan berakibat pada meningkatnya pengungkapan sukarela perusahaan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya personil dewan yang meminimalisir terjadinya perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan. Komite audit yang independen memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan, meninjau, dan menilai sistem pengendalian internal dan memantau hubungan antara manajemen dan auditor eksternal (NACD,2000). Dengan semakin banyaknya komite audit yang independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan khususnya dalam hal menyajikan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh akuntan perusahaan.

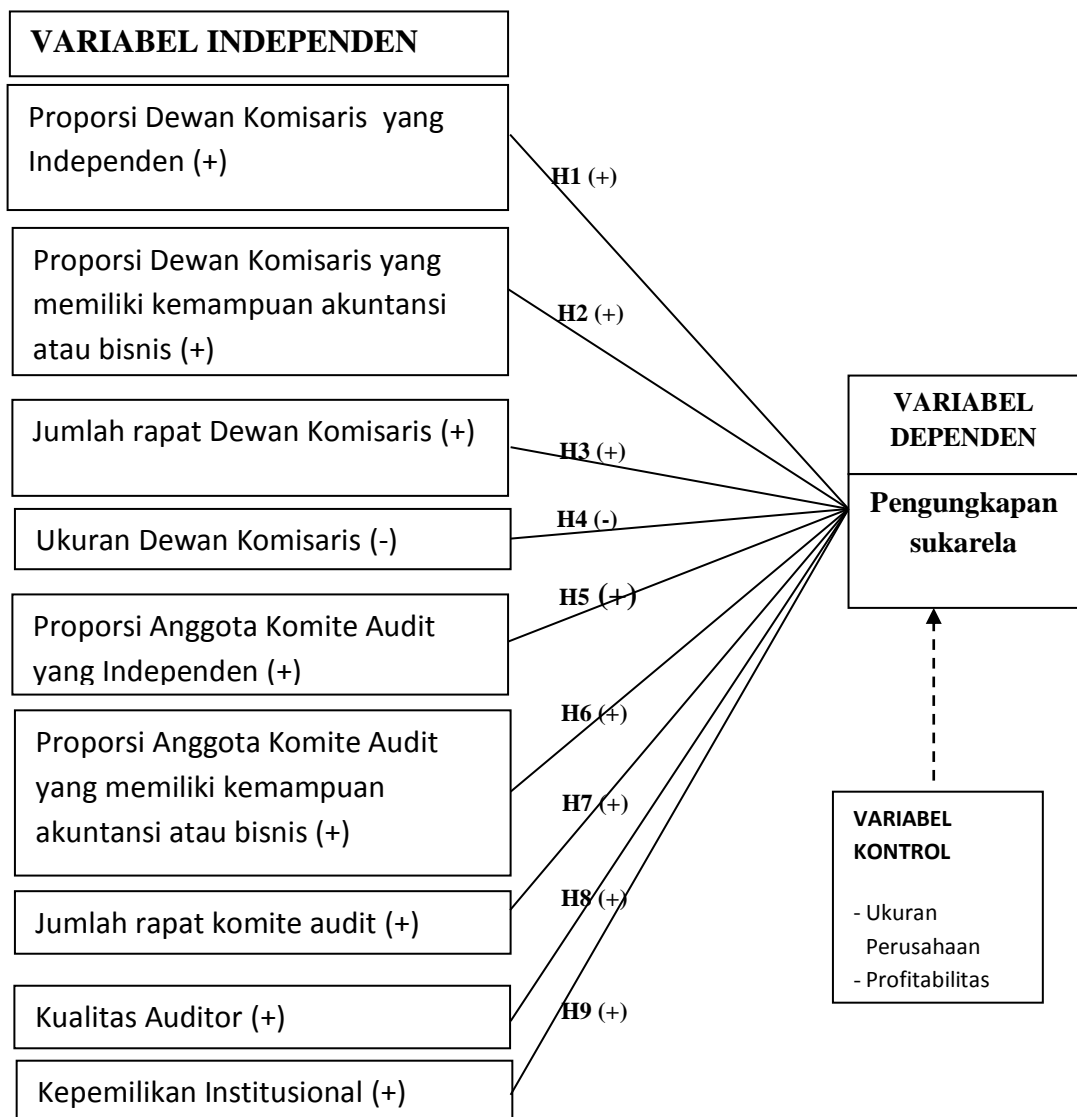
Komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela.

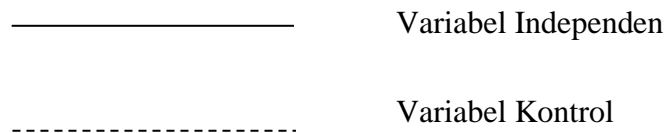
Komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi atau bisnis menjaga hasil kualitas auditor karena komite audit bekerja secara obyektif dengan kemampuan yang profesional dan memadai. Sama halnya dewan komisaris, komite audit juga diwajibkan mengadakan rapat. Frekuensi rapat yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan tingkat koordinasi, tingkat pengawasan, dan pengendalian dan berdampak pada meningkatnya tingkat pengungkapan. Kualitas pengungkapan dapat dinilai dari kualitas auditor perusahaan. Jika kualitas auditor perusahaan baik maka tingkat pengungkapan perusahaan pun semakin tinggi karena kantor akuntan publik yang besar cenderung memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik. Proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, dan kualitas auditor dapat mencerminkan tingkat kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan.

Terdapat tiga jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi anggota komite audit yang independen, proporsi anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat anggota komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional merupakan variabel independen. Pengungkapan sukarela merupakan variabel dependen. Ukuran perusahaan

dan profitabilitas merupakan variabel kontrol yang berfungsi untuk mengendalikan agar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran





2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Proporsi Dewan Komisaris yang Independen

Masalah keagenan muncul dari konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen puncak (dewan). Berhubungan dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) manajemen puncak seperti dewan komisaris perusahaan cenderung membatasi pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dalam laporan tahunan yang akan merugikan para pemegang saham dalam mengambil keputusan. Sedangkan dewan komisaris memiliki fungsi yaitu mengawasi kinerja manajer dalam kegiatan operasional perusahaan khususnya dalam hal pengungkapan. Akan tetapi sesuai dengan teori keagenan dewan komisaris lebih mengutamakan kepentingan perusahaan daripada pemegang saham. Agar kepentingan pemegang saham menjadi prioritas utama dalam perusahaan maka perusahaan harus meningkatkan tingkat pengawasan kinerja manajer puncak agar tidak memetingkan kepentingan direksi atau suatu oknum yang dapat merugikan para pemegang saham. Oleh karena itu dibutuhkannya dewan komisaris yang bersifat independen yang tidak memihak dewan direksi. Semakin banyak pihak independen dalam dewan komisaris akan mengurangi masalah keagenan yang muncul dalam

perusahaan serta dapat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajer dalam hal pengungkapan sukarela.

Beberapa studi empiris telah menguji hubungan antara dewan komisaris yang independen dan pengungkapan sukarela dan menghasilkan hubungan yang positif (contoh Arifin , 2001; Ayu K, 2013; Chen dan Janggi, 2000; Arcay dan Vazquez, 2005). Berdasarkan teori agensi dengan memiliki dewan komisaris yang independen akan memiliki kekuatan lebih besar dalam memonitor manajemen untuk mengungkapkan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hipotesis berikut:

H1: Proporsi dewan komisaris yang independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.2. Proporsi Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis

Kemampuan akuntansi atau bisnis yang dimiliki oleh dewan komisaris digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah memiliki pengaruh terhadap pengungkapan sukarela. Karena dengan memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sistem pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan sehingga perusahaan dapat menyajikan pengungkapan yang dibutuhkan oleh para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan. Sesuai dengan Pedoman GCG Indonesia 2006 tentang kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris yang menyebutkan bahwa anggota

dewan komisaris harus memiliki syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Maka dari itu semakin banyak dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis semakin tinggi pula tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

Hipotesis penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Nuryaman (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh positif proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis (KEMPDK) terhadap pengungkapan sukarela. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan hipotesis sebagai berikut:

H2: Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.3. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

FCGI (2002) menjelaskan bahwa rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara manajemen. Dari perspektif teori keagenan, frekuensi pertemuan dapat dipandang sebagai proksi waktu yang digunakan dewan untuk melaksanakan tugas dan tingkat kegiatan monitoring mereka (Laksamana, 2008). Kegiatan rapat akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Oleh karena itu dengan semakin

sering dewan komisaris melaksanakan rapat dapat diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajer sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan khususnya pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian ini telah didukung oleh hasil penelitian Septiani (2011) dan Ahmad (2012) yang telah menunjukkan adanya pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan sukarela. Dari uraian tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.4. Ukuran Dewan Komisaris

Terdapat perbedaan pendapat mengenai ukuran dewan komisaris. Ada pendapat yang mendukung ide untuk meningkatkan ukuran dewan komisaris seperti yang dijelaskan dalam teori ketergantungan sumber daya. Dalam teori ketergantungan sumber daya dijelaskan bahwa menurut Pfeffer dan Salancik (1978) menyebutkan bahwa teori ketergantungan sumber daya terhadap hubungan inter-organisasional adalah suatu fenomena dimana inter-organisasi akan mengatur secara keseluruhan di berbagai tingkatan hasil performansi organisasi. Menurut Pfeffer dan Salancik (1978) faktor internal organisasi hanya menyumbang 10 persen terhadap kinerja organisasi. Pfeffer dan Salancik (1978) memberikan solusi terhadap masalah saling ketergantungan adalah dengan meningkatkan pengawasan yang menguntungkan bagi setiap pihak yang

bersangkutan. Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan cara mengurangi ukuran dewan komisaris.

Sedangkan pendapat lain yaitu menurut Lipton dan Lorsch (1992) menyatakan bahwa ukuran dewan yang besar tidak dapat berfungsi secara maksimal karena dengan banyaknya jumlah dewan akan mudah dikendalikan oleh manajer puncak yang akhirnya kinerja perusahaan menjadi tidak jujur. Sedangkan kecilnya ukuran dewan komisaris akan meningkatkan tingkat efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan karena dapat meminimalisir perbedaan pendapat antara dewan.

Sesuai dengan teori ketergantungan sumber daya bila ukuran dewan komisaris suatu perusahaan ukurannya besar, maka akan memiliki kemampuan yang lebih dalam pengungkapan. Akan tetapi dewan komisaris akan lebih mudah dikendalikan oleh lingkungan eksternal. Hal ini akan sangat berpengaruh pada objektivitas kinerja dewan komisaris dalam melakukan pengungkapan sukarela, karena dewan komisaris akan cenderung membatasi pengungkapan sukarela demi kepentingan perusahaan daripada pemegang saham. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pengawasan dan pengontrolan diantara dewan komisaris dengan cara mengurangi jumlah dewan komisaris. Dengan sedikitnya jumlah dewan dapat meningkatkan pengawasan dan pengontrolan sehingga dewan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela untuk kepentingan pemegang saham. Pendapat tentang kecilnya ukuran dewan komisaris didukung oleh beberapa komite dan laporan tentang praktik tata

kelola perusahaan di seluruh dunia, dimana hal ini juga direkomendasikan dalam laporan Hampel (1998). Beberapa studi empiris menemukan pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan (Vafeas, 2000 dan Ahmad, 2012). Oleh karena itu, dengan kecilnya ukuran dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan meningkatnya pengungkapan yang dilakukan perusahaan, maka hipotesisnya adalah:

H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.5. Proporsi Komite Audit yang Independen

Komite audit memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pelaporan keuangan, meninjau, dan menilai sistem pengendalian internal dan memantau hubungan antara manajemen dan auditor eksternal (NACD, 2000). Peran ini akan sangat membantu para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan. Karakteristik yang paling penting dari komite audit adalah adanya mayoritas komite audit yang independen agar menjaga hasil kualitas auditor karena komite audit bekerja secara obyektif dan tidak memihak siapapun baik manajer, pemegang saham ataupun pihak-pihak yang berkuasa. Dengan semakin banyaknya komite audit yang independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan khususnya dalam hal menyajikan pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh akuntan perusahaan. Meningkatnya pengawasan akan meminimalisir kemungkinan

manipulasi dan pembatasan dalam pengungkapan sehingga pengungkapan sukarela perusahaan dapat meningkat.

Dalam penelitian sebelumnya menemukan hubungan positif antara keberadaan komite audit dan pengungkapan sukarela (Ho & Wong, 2001). Berdasarkan pendapat tersebut keberadaan komite audit yang independen akan memberikan pengetahuan, kualitas pelaporan yang lebih baik dan meningkatkan tingkat pengawasan dalam membuat laporan tahunan sehingga dapat meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H5 : Proporsi komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.6. Proporsi Anggota Komite Audit yang Memiliki Kemampuan

Akuntansi atau Bisnis

Karakteristik yang paling penting dari komite audit adalah adanya komite audit yang memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi atau bisnis agar menjaga hasil kualitas audit karena komite audit bekerja secara obyektif dengan kemampuan yang profesional dan memadai. Anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis akan lebih memahami jalannya proses pengungkapan dan hal-hal yang perlu diungkapkan oleh perusahaan daripada komite audit yang tidak memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis. Semakin banyak anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis akan semakin tinggi

tingkat pemahaman terhadap pengungkapan sehingga komite audit akan meningkatkan pengawasan terhadap proses pengungkapan yang dilakukan oleh akuntan perusahaan. Komite audit yang memahami proses pengungkapan akan mengidentifikasi hal-hal mencurigakan berkaitan dengan pengungkapan dan dapat meminimalisasi pembatasan pengungkapan karena komite audit mengetahui hal-hal yang perlu diungkapkan oleh perusahaan.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tahun 2012 mengeluarkan persyaratan mengenai keanggotaan komite audit yang wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan kemampuan di bidang akuntansi atau bisnis. Hal ini dilakukan karena dengan memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis akan memberikan pengetahuan dan kualitas pelaporan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya menemukan hubungan positif antara proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dan pengungkapan sukarela adalah Kent, *et al.* (2010) dan Akhtaruddin & Haron (2010), maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H6: Anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.7. Jumlah Rapat Komite Audit

Rapat komite audit merupakan koordinasi antara anggota-anggota agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG perusahaan (Wulan, 2013). Frekuensi rapat yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan tingkat koordinasi, tingkat pengawasan, dan pengendalian dan berdampak pada meningkatnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Wulan (2013) menunjukkan adanya pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan. Dalam hal ini sesuai dengan persyaratan Bapepam-LK (2012) dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 yang menyatakan bahwa rapat komite audit paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Sesuai dengan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H7 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.8. Kualitas Auditor

Kualitas auditor didefinisikan sebagai probabilitas gabungan mendeteksi dan melaporkan material kesalahan laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Dengan demikian kualitas auditor yang baik, maka akan menghasilkan informasi yang baik. Teori keagenan memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas auditor karena sebuah kantor akuntan

publik yang besar dan independen memiliki kemampuan yang lebih dalam menangani masalah keagenan dengan menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang tinggi (Jensen dan Meckling, 1976).

Menurut DeAngelo (1981) kantor akuntan publik yang besar cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak dalam rangka mengurangi kewajiban hukum mereka. Beberapa penelitian yang meneliti hubungan dari kantor akuntan publik yang besar dengan kualitas pelaporan keuangan seperti Nuryaman (2009) dan Barros, *et al.* (2013) menemukan adanya hubungan positif antara kantor akuntan publik yang menjadi 4 besar dengan pengungkapan sukarela. Berdasarkan argumen diatas bahwa kantor akuntan publik yang menjadi 4 besar akan meningkatkan informasi dan memberikan informasi yang berkualitas, maka hipotesisnya adalah:

H8: Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

2.5.9. Kepemilikan Institusional

Salah satu ciri perusahaan modern adalah adanya pemisahan kepemilikan dengan manajemen. Pemisahan ini menyebabkan munculnya masalah keagenan yang berfokus pada masalah kepentingan antara kepemilikan manajemen. Kepemilikan institusional merupakan bentuk kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu atau lebih institusi (lembaga). Institusi atau lembaga di sini dapat berupa bank, perusahaan investasi, ataupun perusahaan lainnya. Adanya kepemilikan

oleh institusi (lembaga) akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap kinerja perusahaan. Institusi keuangan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer agar tidak menyimpang dan bekerja sesuai kepentingan para pemegang saham.

Berdasarkan teori agensi jika kepemilikan institusional yang memiliki proporsi saham yang lebih besar akan dapat mendesak para manajer dan direktur untuk melakukan pengungkapan baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela. Penelitian Ayu K (2013) menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan sukarela. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H9: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.

Tabel 2.2
Ringkasan Hipotesis

No	Hipotesis	
1	Hipotesis 1	Proporsi dewan komisaris yang independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
2	Hipotesis 2	Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
3	Hipotesis 3	Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
4	Hipotesis 4	Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela
5	Hipotesis 5	Proporsi komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
6	Hipotesis 6	Anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
7	Hipotesis 7	Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
8	Hipotesis 8	Kualitas auditor berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela
9	Hipotesis 9	Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen : Pengungkapan Sukarela
2. Variabel independen : *Corporate Governance* yang terdiri dari proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan institusional.

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dalam penelitian ini adalah pengungkapan sukarela. Dalam penelitian ini seperti penelitian sebelumnya (Naseer dan Nuseibeh 2003) yang menggunakan pendekatan dikotomis yaitu dengan 1 bila diungkapkan dan 0 bila tidak diungkapkan. Pengukuran variabel dependen ini memadukan tiga sumber daftar item pengungkapan sukarela yang digunakan oleh Sehar, *et al.* (2013), Darmadi dan Sodikin (2013), dan

Anyta (2011). Semula penelitian ini menggunakan daftar item pengungkapan sukarela yang telah digunakan oleh Anyta (2011) yang berisi 34 item VD yang terdiri dari 11 kategori. Selanjutnya dipadukan dengan daftar item yang digunakan dalam penelitian Sehar, *et al.* (2013) yang berisi 44 item VD yang terdiri dari 8 kategori dan daftar item yang digunakan dalam penelitian Darmadi dan Sodikin (2013) yang berisi 49 item VD yang terdiri dari 8 kategori. Daftar item tersebut disesuaikan dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor KEP-431/BL/2012 karena terdapat item-item yang semula *voluntary disclosure* menjadi *mandatory disclosure*. Item-item tersebut adalah (1)kemampuan dan integritas anggota direksi, (2)mekanisme kerja direksi, (3)tugas dan independensi komite audit, (4)informasi Satuan Pengawas Internal, (5)Jumlah dan jabatan masing-masing anggota SPI, (6)Tugas, tanggung jawab, dan aktivitas SPI, (7)Keberadaan etika perusahaan, (8)Isi etika perusahaan, (9)jumlah rapat dewan komisaris, (10)jumlah rapat komite audit, (11)Sejarah, tujuan, visi, dan misi perusahaan, (12)keberadaan dan tugas komite remunerasi perusahaan. Jumlah item yang digunakan dalam penelitian ada 25 item dengan 11 kategori. Daftar inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengukur pengungkapan sukarela yang diungkapkan oleh perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memberi pengaruh kepada variabel dependen. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pengungkapan sukarela dan variabel independennya adalah mekanisme *Corporate Governance* (Tata kelola perusahaan) yang terdiri dari proporsi dewan komisaris yang independen, proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat dewan komisaris, kualitas auditor, ukuran dewan komisaris, proporsi komite audit yang independen, proporsi komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis, jumlah rapat komite audit, kualitas auditor dan kepemilikan Institusional.

3.1.2.1. Proporsi Dewan Komisaris yang Independen

Dewan Komisaris adalah salah satu bagian dari dewan perusahaan yang dipilih dari pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Dewan komisaris dibagi menjadi dua yaitu dewan komisaris dan dewan komisaris independen. Dalam penelitian ini menggunakan dewan komisaris independen karena dapat mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan. Dewan komisaris yang independen diukur dengan persentase jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Data proporsi dewan komisaris yang independen disajikan dengan skala nominal dengan lambing DKI.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

3.1.2.2. Proporsi Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis

Dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis yang digunakan dalam penelitian ini karena dengan memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dapat memiliki pengetahuan yang lebih terhadap sistem pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan dapat menyajikan pengungkapan yang dibutuhkan oleh para pemegang saham dan pengguna laporan keuangan. Selain itu sesuai dengan Pedoman GCG Indonesia 2006 tentang kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris yang menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris harus memiliki syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dapat diukur dengan jumlah dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Sedangkan kriteria kemampuan akuntansi atau bisnis adalah:

1. Dewan komisaris yang memiliki pendidikan S1, S2, atau S3 dibidang akuntansi atau bisnis.
2. Dewan komisaris yang pernah bekerja di lembaga keuangan, Kantor Akuntan Publik, dan perbankan.

3. Dewan komisaris yang pernah bekerja di bagian keuangan seperti direktur keuangan.

Data ukuran proporsi dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis disajikan dengan skala nominal dengan lambang KEMPDK.

$$KEMPDK = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

3.1.2.3. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris digunakan dalam penelitian ini karena dalam rapat tersebut akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan. Serta dengan dilaksanakannya rapat dapat meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajer sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan khususnya pengungkapan sukarela perusahaan. Jumlah rapat dewan komisaris dapat diukur dengan jumlah keseluruhan rapat yang dilaksanakan dewan komisaris perusahaan selama satu tahun. Data jumlah rapat dewan komisaris disajikan dengan skala nominal dengan lambang RPTDK.

3.1.2.4. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah atau banyaknya orang yang menjabat sebagai dewan komisaris dalam perusahaan. Dewan

komisaris berperan dalam meningkatkan pengungkapan sukarela melalui keputusan dan fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris diukur menggunakan jumlah total anggota dewan komisaris yang berada di dalam perusahaan. Data ukuran dewan komisaris disajikan dengan skala nominal dengan lambang UD.

$$UD = \text{Jumlah Anggota Dewan komisaris}$$

3.1.2.5. Proporsi Anggota Komite Audit yang Independen

Dalam penelitian ini menggunakan proporsi anggota komite audit yang independen karena agar menjaga hasil kualitas auditor karena komite audit bekerja secara obyektif dan tidak memihak siapapun baik manajer, pemegang saham ataupun pihak-pihak yang berkuasa. Dalam hal ini proporsi anggota komite audit yang independen diukur dengan jumlah komite audit yang independen dibagi dengan jumlah anggota komite audit. Kriteria independen adalah:

1. Komite audit tidak memiliki kepemilikan saham terhadap perusahaan.
2. Komite audit tidak pernah bekerja di perusahaan.
3. Komite audit tidak memiliki hubungan keluarga dengan direktur, dewan komisaris, dan karyawan.

Data proporsi anggota komite audit yang independen disajikan dengan skala nominal dengan lambing KAUDI.

$$KAUDI = \frac{\text{Jumlah Komite Audit yang Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit}}$$

3.1.2.6. Proporsi Anggota Komite Audit yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis

Audit adalah salah satu cara untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Sebagai anggota audit diharuskan memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis karena agar menghasilkan laporan yang berkualitas baik. Anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis diukur dengan persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis dibagi dengan jumlah total anggota komite audit. Kriteria kemampuan akuntansi atau bisnis adalah:

1. Anggota komite audit yang memiliki pendidikan S1, S2, atau S3 dibidang akuntansi atau bisnis.
2. Anggota komite audit yang pernah bekerja di lembaga keuangan atau perbankan.
3. Anggota komite audit yang pernah bekerja di bagian keuangan seperti direktur keuangan.

Data pengukuran jumlah anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis disajikan dengan skala nominal dengan lambing KEMPAUD.

$$KEMPAUD = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit yang Memiliki Kemampuan Akuntansi atau Bisnis}}{\text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

3.1.2.7. Jumlah Rapat Komite Audit

Dalam penelitian ini menggunakan jumlah rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan tingkat koordinasi, tingkat pengawasan, dan pengendalian dan berdampak pada meningkatnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Jumlah rapat komite audit dapat diukur dengan jumlah keseluruhan rapat yang dilaksanakan komite audit perusahaan selama satu tahun. Data jumlah rapat komite audit disajikan dengan skala nominal dengan lambang RPTAUD.

3.1.2.8. Kualitas auditor

Menurut DeAngelo (1981) kualitas auditor yang baik ditentukan oleh kantor akuntan publik yang besar karena kantor akuntan publik yang besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Kantor akuntan publik yang menjadi empat besar di Indonesia merupakan kantor akuntan publik yang dapat dipercaya, maka dari itu informasi yang diungkapkan memenuhi kualitas yang baik. Pengukuran kualitas auditor diukur menggunakan variabel dummy jika 1 perusahaan diaudit oleh kantor akuntan public yang menjadi 4 besar di Indonesia dan 0 lainnya. Data pengukuran kualitas auditor disajikan dengan skala nominal dengan lambing KA.

3.1.2.9. Kepemilikan Institusional

Dalam penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap kinerja perusahaan. Hal ini akan mendorong peningkatan pengungkapan sukarela

yang dilakukan oleh direktur dan manajer perusahaan. Pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah persentase ekuitas saham yang dimiliki oleh intitusi dan/atau lembaga lain. Data pengukuran kepemilikan institusional disajikan dengan skala nominal dengan lambang KI.

3.1.3. Variabel Kontrol

Dimasukkannya variabel kontrol dalam penelitian ini adalah untuk menghindari pengungkapan sukarela yang dipengaruhi oleh variabel terkontrol tersebut. Variabel kontrol adalah variabel yang mengontrol hubungan variabel dependen dan variabel independen dan pasti berpengaruh terhadap variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dinyatakan dalam lambang UP. Variabel ini menggambarkan seberapa besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan yang diukur dengan total aktiva yang diubah dalam bentuk logaritma.

2. Profitabilitas

Variabel profitabilitas dinyatakan dengan lambang ROE. Variabel ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan diukur dengan rasio laba bersih terhadap total ekuitas perusahaan.

3.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun buku 2010-2013. Sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pemilihan sampel yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan manufaktur.
2. Terdaftar di BEI dalam list *fact book* 2010 dan mempublikasikan laporan tahunan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2010- 2013.
3. Laporan tahunan yang mengungkapkan informasi lengkap mengenai riwayat pendidikan dewan komisaris dan komite audit.
4. Laporan tahunan yang mengungkapkan informasi lengkap mengenai jumlah rapat secara nominal dewan komisaris dan komite audit.
5. Laporan keuangan yang menggunakan nilai rupiah.
6. Adanya distribusi *unstandardized data* normal. Hal ini berarti, data yang tidak normal dan menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria tersebut harus dikeluarkan dari sampel, karena syarat berlakunya model adalah terpenuhinya kriteria tersebut.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia yang tersedia di pojok BEI Universitas Diponegoro, dan *website* perusahaan khususnya data tahun 2010-2013. Bentuk data yang digunakan adalah data *panel* berada di tahun yang berbeda dan dari berbagai perusahaan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi dari media cetak dan elektronik. Data diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atau internet (www.idx.go.id dan situs perusahaan). Dari sumber tersebut diperoleh data kuantitatif berupa data laporan keuangan (*annual report*) yang telah diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah *listed* di Bursa Efek Indonesia serta Indonesia *Capital Market Directory* tahun 2010-2013.

3.5. Metode Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan alat-alat statistik sebagai berikut:

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode-metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2005). Dengan statistik deskriptif, kumpulan data

yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1. *Multikolinearitas*

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance* kurang dari 0,05 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011).

3.5.2.2. *Uji Normalitas*

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S). Uji K-S dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau asymp. Sig (2-tailed). Sebelumnya perlu ditentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, yaitu:

Hipotesis (H1) : data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (H_A) : data tidak terdistribusi secara normal

Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih dari $\alpha = 0,05$; maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas signifikansi kurang dari nilai $\alpha = 0,05$; maka data tidak terdistribusi secara normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka perlu dilakukan transformasi logaritma (Ln) terhadap model regresi, sehingga data dapat terdistribusi secara normal.

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crossection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2011).

Uji heteroskedastisitas memiliki cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel bebas, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized (Ghozali, 2011)

Dasar analisis dalam grafik uji heteroskedastisitas adalah yang pertama dengan melihat jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis yang kedua adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Analisis dengan menggunakan plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit

menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) dengan persamaan regresi :

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Apabila probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%, maka tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel nilai Absolut U_t (Abs U_t) (Gozali, 2011).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2011). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji *Durbin-Watson* (DW test). Uji *Durbin-Watson* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan

adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1
Keputusan Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada Autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada Autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada korelasi, positif maupun negatif	Tidak Ditolak	$D_u < d < 4 - d_u$

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan sebagai metode analisis karena dapat mengukur tingkat pengaruh variabel-variabel independen terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, serta sifat hubungan masing-masing

variabel apakah positif atau negatif terhadap pengungkapan sukarela. Analisis regresi *cross-sectional* digunakan dalam penelitian ini karena data penelitian yang dikumpulkan merupakan data dari berbagai perusahaan pada waktu yang sama. Analisis ini membandingkan perbedaan antara subyek satu dengan subyek lainnya. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$VD = \beta_0 + \beta_1DKI + \beta_2KEMPDK + \beta_3RPTDK + \beta_4UD + \beta_5KAUDI \\ + \beta_6KEMPAUD + \beta_7RPTAUD + \beta_8KA + \beta_9KI \\ + \beta_{10}UP + \beta_{11}ROE + \varepsilon$$

VD : Pengungkapan sukarela

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{11}$: Koefisien regresi

DKI : Dewan komisaris yang independen

KEMPDK : Dewan komisaris yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis

RPTDK : Jumlah rapat dewan komisaris

UD : Ukuran dewan komisaris

KAUDI : Komite audit yang independen

KEMPAUD : Komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi atau bisnis

RPTAUD	: Jumlah rapat komite audit
KA	: Kualitas auditor
KI	: Kepemilikan institusional
UP	: Ukuran perusahaan
ROE	: Profitabilitas
ε	: Error

3.5.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan terhadap tiga model yang digunakan dalam penelitian. Model persamaan akan digunakan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan sukarela. Beberapa langkah pengujian hipotesis yang akan dilakukan adalah uji nilai koefisien determinasi, uji signifikansi sumultan (statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

3.5.4.1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model, maka semakin besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Data silang (*crossection*) cenderung memiliki nilai koefisien determinasi yang relatif rendah. Kecenderungan tersebut disebabkan karena adanya variasi yang besar antara masing-masing

pengamatan. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model. Nilai koefisien determinasi akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen, meskipun variabel tersebut sebenarnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (*F test*)

Uji signifikansi simultan (*F test*) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model penelitian memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Terdapat dua kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian statistik *F*, H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5% apabila nilai *F* lebih besar daripada 4 dan apabila nilai *F* hitung lebih besar dari nilai *F* tabel.

3.5.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (*Uji Statistik t*)

Uji statistik *t* dilakukan untuk menunjukkan pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk mengetahui apakah H_0 ditolak atau diterima, terdapat dua kriteria pengambilan keputusan yang dapat digunakan dalam uji statistik *t*. Kriteria yang pertama adalah H_0 ditolak jika nilai *t* lebih besar daripada 2. Kedua, apabila nilai statistik *t* hasil perhitungan lebih besar dibandingkan nilai *t* tabel, maka hipotesis alternatif yang menyatakan

bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dapat diterima.